

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang besar di dunia. Kebesaran tersebut dimiliki atas dasar perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa yang ada diseluruh pelosok tanah air. Dalam rangka menjaga kestabilan kebesaran yang dimilikinya, maka diperlukan satu tujuan dan cita-cita yang sama bagi segenap bangsa Indonesia. Salah satu tujuan dan cita-cita tersebut tertuang dalam tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>1</sup>

Selanjutnya tujuan yang tertuang dalam perundangan tersebut sejalan pula dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut; “(1) Tiap-tiap warga negara berhak

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<https://zzifen.files.wordpress.com/2013/10/uu-no-2-th-1989-ttg-sisdiknas.pdf>), diakses pada tanggal 6 Januari 2015 pukul 19.48 WIB.

mendapatkan pengajaran; dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang”<sup>2</sup>.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut membuktikan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang berarti bahwa pendidikan itu merupakan Hak Azasi Manusia (HAM). Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal, maka pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang telah diatur dalam bentuk perundang-undangan. Usaha pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Seiring dengan perubahan zaman dan tingkat perkembangan masyarakat, terutama sejak bergulirnya era orde baru yang menghadirkan era reformasi, menuntut adanya perbaikan di segala bidang. Pendidikan adalah salah satu bidang yang menjadi tuntutan perbaikan tersebut, maka lahirlah format-format baru dalam penataan sistem pendidikan nasional dengan tidak merubah tujuan utama pendidikan nasional. Format-format baru tersebut selanjutnya dikenal dengan Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah, Pusat, dan Daerah.,serta Peraturan Pemerintah (PR) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

---

<sup>2</sup>*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (<http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf>), diakses pada tanggal 6 Januari 2015 pukul 20.22.

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang selanjutnya menjadi landasan yuridis bagi diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang berimbang pula terhadap penataan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Makna yang terkandung dari ketiga peraturan tersebut adalah adanya pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Pemberian wewenang ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dijalankan lebih demokratis, meningkatnya peran serta masyarakat, terwujudnya pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersyarat bahwa otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang beberapa urusan pemerintahan pusat kepada daerah, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Dengan otonomi di bidang pendidikan, maka daerah akan memiliki wewenang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan sendiri pembangunan pendidikan. Berdasarkan model otonomitersebut, lahirlah model pengelolaan sekolah yang pada satu sisi memberikan keleluasaan untuk mengelolasekolah kepada pihak sekolah (kepala sekolah dan guru) dan di sisi lain memberikan peluang untuk turut serta kepada masyarakat. Model pengelolaan tersebut selanjutnya disebut dengan istilah "Manajemen Berbasis Sekolah"(MBS).

Dalam pelaksanaan MBS, sekolah diberikan kewenangan untuk mengendalikan sekolah secaramandiri, terutama dalam hal

pengambilan keputusan untuk kepala sekolah, guru, pegawai, murid, orang tua serta masyarakat atau pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah tersebut. Kewenangan yang lebih besar dari institusi sekolah ini menuntut adanya kemauan dan kemampuan seluruh personel sekolah yang lebih berkualitas, terutama kepala sekolah. Hal ini karena kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengoordinasikan, menggerakkan, dan menyetarakan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sekolah.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan bagaimana penerapan MBS tersebut di lapangan serta peran kepemimpinan kepala sekolah dalam penyelenggaraan manajemen tersebut. Maka penulis mengambil sampel salah satu sekolah yang telah menjalankan program MBS. Sekolah yang diambil sebagai tempat penelitian tentang peran kepemimpinan kepala sekolah dalam rangka implementasi MBS adalah SMK Negeri 26 Jakarta.

SMK Negeri 26 Jakarta berdiri sejak 1971. Sekolah yang berlokasi di Jalan Balai Pustaka Baru No. 1 Jakarta Timur ini, merupakan sekolah perintis STM pembangunan. Sekolah ini memiliki jangka waktu masa pendidikan yang berbeda, yaitu selama 4 tahun, dimana 3 tahun belajar

keahlian sesuai dengan jurusannya dan 1 tahun melaksanakan Praktek Sistem Ganda (PSG) di dunia usaha/industri. Pola pembelajaran tersebut karena keinginan pemerintah untuk menciptakan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi, keterampilan, keahlian tertentu dan siap untuk terjun di dunia kerja. Maka dibuatlah 8 sekolah model tersebut di Indonesia, yang salah satunya adalah SMK Negeri 26 Jakarta.

SMK Negeri 26 Jakarta memiliki visi “menjadi yang terbaik dengan keunggulan prestasi dan berakhlak mulia”. Melalui visi tersebut, SMKN 26 telah membuktikan dengan keberhasilan para peserta didiknya dalam meraih beberapa prestasi di lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional. Salah satu lomba yang diikuti oleh siswa SMKN 26, yaitu Lomba Kompetensi Sekolah (LKS) tingkat nasional yang selalu membawakan perak, perunggu ataupun emas untuk sekolah. Begitupun perlombaan lainnya, seperti lomba debat bahasa inggris atau keilmiahan lainnya. Terahir, siswa SMKN 26 berhasil meraih prestasi di OSPN di Lombok, yaitu Juara 1 fisika tingkat nasional dan juara 3 matematika tingkat nasional.

Banyaknya prestasi yang telah di dapat oleh SMKN 26, telah membuat sekolah ini termasuk dalam 10 SMK terbaik di Indonesia<sup>3</sup>. Hal tersebut membuat banyaknya pendaftar dan ketatnya persaingan ketika penerimaan siswa baru yang dibuka setiap tahunnya. Oleh karena itu

---

<sup>3</sup> Ini 10 SMK Terbaik di Indonesia. <file:///G:/ini-10-smk-terbaik-di-indonesia-sekolahmu-salah-satunya.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 10.36 WIB.

cukup sulit bagi alumni SMP yang ingin diterima menjadi pelajar di sekolah ini, kecuali berprestasi atau sedang beruntung.

Sejak awal dibangun, SMK Negeri 26 telah membuka 6 jurusan, yaitu Teknik Bangunan, Teknik elektro, Teknik Otomotif, Teknik Listrik, Teknik Komputer Jaringan dan Teknik Mesin. Setiap jurusan di SMK Negeri26 mempunyai ketua program keahliannya masing-masing.

Dalam menggerakkan warga sekolah, banyak tugas-tugas yang membutuhkan penanganan kepemimpinan lebih cepat untuk menyelesaikannya. Adanya ketua program keahlian dan struktur organisasi di jurusan diharapkan memudahkan kepala sekolah dalam memimpin warga sekolah secara keseluruhan. Selain itu, ketua program keahlian juga membantu kepala sekolah dalam mengembangkan pembelajaran dan peningkatan profesi guru di jurusannya. Otonomi yang diberikan oleh kepala sekolah di jurusan diharapkan juga mendukung kepemimpinan kepala sekolah dalam mengimplementasikan MBS.

Berbagai keunggulan serta prestasi yang dicapai oleh SMK Negeri26 yang telah dijabarkan di atas, tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai nahkoda di sekolah, Bagaimana kepala sekolah menggerakkan, memotivasi dan memberikan teladan menjadi salah satu pendorong keberhasilan prestasi di SMK Negeri 26 Jakarta.

Berdasarkan latar belakang yang muncul yang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kepemimpinan

Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 26 Jakarta Timur”.

## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK NEGERI 26 Rawamangun, Jakarta Timur, dengan sub fokus kepala sekolah dalam menggerakkan, memotivasi, memberikan teladan dan efek dari kepemimpinan kepala sekolah.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah dalam implementasi MBS di SMK Negeri 26 Jakarta?
2. Bagaimana peran kepala sekolah dalam memberi motivasi warga sekolah dalam implementasi MBS di SMK Negeri 26 Jakarta?
3. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai teladan dalam implementasi MBS di SMK Negeri 26 Jakarta?
4. Bagaimana efek kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi MBS di SMK Negeri 26 Jakarta?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti maupun bagi pihak pengembangan ilmu dan pengetahuan sebagai acuan dalam memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di tingkat sekolah.

Adapun manfaat penelitian secara rinci adalah :

##### 1. Secara Teoritis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya dalam mengetahui peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk penelitian lain dalam bidang manajemen pendidikan.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Sebagai wahana untuk menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus memberikan inovasi dalam peran kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah.



b. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai acuan perlunya peran kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah guna memajukan sekolah yang unggul dan berkualitas.

c. Bagi SMK Negeri 26 Jakarta

Memberikan sumbangan dan pemikiran bagi sekolah terhadap pentingnya peran kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, sehingga dapat disajikan referensi bagi sekolah dalam pengembangan peran kepemimpinan kepala sekolah.